


RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	AKSI KEGIATAN	TARGET				INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
					I	II	III	IV				
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Presentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	1	Koordinasi Penyusunan LPPD Perangkat Daerah seKabupaten Nganjuk	√	√	√	√	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	162.587.600
			2	Penyusunan LPPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	√	√	√	√	Ketepatan waktu dalam penyampaian LPPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	162.587.600
			3	jumlah kerjasama anatar Daerah yang difasilitasi	√	√	√	√	Presentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	417.449.900
			4	jumlah permasalahan fasilitasi dibidang pertanahan yang terdampak pembangunan	√	√	√	√				
			5	jumlah persetujuan izin pelepasan total kas Desa oleh Gubernur Jatim	√	√	√	√				
2	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang berkualitas	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	1	Meningkatkan Koordinasi dengan perangkat daerah Pemprakarsa dan yang terkait	√	√	√	√	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 399.865.000
			2	Menyiapkan data pendukung pelaksanaan pembahasan RAPERDA	√	√	√	√	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	fasilitasi bantuan hukum	Rp 400.000.000

			3	Melakukan Pembahasan dan Penyempurnaan RAPERDA	√	√	√	√	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp 138.662.800
			4	Melakukan Koordinasi, Konsultasi Dalam Rangka Fasilitasi dan Evaluasi RAPERDA Ke Provinsi	√	√	√	√	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Rp 206.883.500
3	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan	1	fasilitasi penyusunan program pembangunan		√			Dokumen yang telah di SK kan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	fasilitasi penyusunan program pembangunan	Rp. 500.000.000
			2	pengendalian dan evaluasi program pembangunan		√			Dokumen yang telah di Perbup kan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Rp.150.000.000
			3	pengelolaan evaluasi pelaksanaan pembangunan		√					pengelolaan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Rp.150.000.000
			4	pengendalian dan distribusi perekonomian		√			Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	pengendalian dan distribusi perekonomian	Rp.100.000.000
			5	perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil		√			jumlah fasilitasi kredit usaha rakyat dan sistem informasi kredit program		perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	200.000.000

			6	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		√			Jumlah BUMD dan BUMS yang terbina	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.75.000.000
3	Meningkatnya Kematangan Organisasi pengadaan barang/jasa	Level Maturitas UKPBJ	1	Pemetaan SDM Pengelola Barang/jasa	√	√	√	√	Rasio SDM Pengelola Pengadaan barang/jasa	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	pengelolaan pengeadaan barang dan jasa	750.000.000
			2	Pemetaan SDM Pengelola Barang/jasa	√	√	√	√	Rasio SDM Pengelola Pengadaan barang/jasa	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	550.000.000
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ baik "B"	1	Pembinaan SAKIP pada masing-masing perangkat daerah		√	√		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai B	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Bimtek Lakip dari Kemenpan dan RB dan dari Biro Organisasi Provinsi	Rp. 63.137.200
5	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	1	Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) Masing-masing Perangkat Daerah			√		Tersedianya Data IKM	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp. 50.127.600


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK
SETDA
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661005 198703 1 010